

ABSTRAK

KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG DI KOTA KUPANG

Studi ini bertujuan untuk menelisik, membongkar praktik produksi ruang ekonomi dan dinamika relasi kuasa dan kepentingan ekonomi politik antara pemerintah, investor atau pengusaha dan masyarakat dalam tata kelola ruang di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan teori Produksi Ruang dari Henri Lefebvre dan teori Akumulasi Kapital Melalui Perampasan Ruang dari David Harvey. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan paradigma atau pendekatan kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Studi ini menemukan beberapa hal penting dalam politik tata kelola ruang di Kota Kupang. Pertama, praktik produksi ruang ekonomi di Kota Kupang menunjukkan dengan jelas adanya dinamika kontestasi dan konflik kepentingan antara aktor pemerintah, investor atau pengusaha dan masyarakat dalam tata kelola ruang. Pemerintah Kota Kupang selalu berusaha untuk mengkonstruksi, mengatur dan merasionalisasi ruang untuk memudahkan dan mengakomodasi kepentingan investor dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan ruang ekonomi demi akumulasi kapital. Kondisi ini menyebabkan tata kelola ruang di Kota Kupang didikte dan didominasi oleh kekuatan kapitalis. Kedua, bentuk relasi kuasa dan kepentingan politik-ekonomi antara aktor pemerintah, investor atau pengusaha dan masyarakat mengarah kepada pola yang bersifat dominasi, hegemoni dan eksklusif serta adanya kontradiksi dan antagonisme kepentingan ekonomi-politik dalam tata kelola ruang di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang memiliki otoritas politik dalam membuat kebijakan tata ruang yang pro pada kepentingan ekonomi dari para investor atau kapitalis yang memiliki kekuatan modal dalam pembangunan dan pengembangan wilayah kota. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kekuatan modal, terus mengalami alienasi, marginalisasi dan eksklusif spasial dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Kupang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meninjau kembali pola pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Kupang jika tidak ingin masyarakat lokal tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan sistemik dan kehancuran ekologis. Selain itu kerja-kerja politik advokasi yang kritis-progresif dari aktivis organisasi sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara terus menerus untuk mengklaim hak atas kota dari masyarakat urban yang selalu tersingkirkan dan teralienasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah kota yang cenderung eksklusif.

Kata Kunci: *Kontestasi, Politik Tata Kelola Ruang, Relasi Kuasa.*

ABSTRACT

POLITICAL CONTESTATION OF SPATIAL GOVERNANCE IN KUPANG CITY

This study aims to investigate and uncover the production of economic space and the dynamics of power relations and political economy interests between the government, investors or entrepreneurs and the community in spatial governance in Kupang City. This research used the theory of production of space from Henri Lefebvre and the Theory of Accumulation by Dispossession of Space by David Harvey. This research also used a qualitative method with a critical paradigm or approach. The data were collected through in-depth interviews, field observations and documentation studies. This study reveals several important findings in the politics of spatial governance in Kupang City. First, the production of spaces in Kupang City clearly shows the dynamics of contestation and conflicts of interest between government actors, investors or entrepreneurs and the community in spatial governance. The government of Kupang City always tries to construct, regulate and rationalize space to facilitate and accommodate investors' interests in using spaces for developing economic space for the sake of capital accumulation. This condition causes spatial governance in Kupang City to be dictated and dominated by capitalist forces. Second, the form of power relations and politico-economic interests between government actors, investors or entrepreneurs and the community leads to domination, hegemony and exclusion as well as the contradiction and antagonism of economic-political interests in spatial governance in Kupang City. The government of Kupang City has the political authority in making spatial policies that are pro-economic interests of investors or capitalists who have the capital power in developing city area. Meanwhile, people who do not have the capital power continue to experience alienation, marginalization and spatial exclusion in the management and utilization of space in the Kupang City area. Therefore, local governments need to review the pattern of development of areas in Kupang City if they do not want local communities to remain trapped in a cycle of systemic poverty and ecological destruction. In addition, the work of progressive-critical political advocacy by the activists of community social organization needs to be carried out continuously to claim the rights to the city from urban communities who are always excluded and alienated in the development of exclusive urban areas.

Keywords: contestation, spatial governance politics, power relations.